



URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK WARGA NEGARA KRITIS DI ERA DEMOKRASI DIGITAL

THE URGENCY OF CIVIC EDUCATION IN DEVELOPING CRITICAL CITIZENS IN THE DIGITAL DEMOCRACY ERA

Rizky Dinda Sarmita Harahap^{1*}, Eva Nur Hidayah², Khusnul Khotimah³, Dyta Agnes Layung Sari⁴, Mitra Permatasari⁵

¹rizky.dinda@lecturer.unri.ac.id*, ²evanur@mail.unnes.ac.id, ³khusnulhotimah@unja.ac.id,

⁴dytaagnesls@unej.ac.id, ⁵mitrapermatasari@upi.edu

¹ Universitas Riau

² Universitas Negeri Semarang

³ Universitas Jambi

⁴ Universitas Jember

⁵ Universitas Pendidikan Indonesia

*) *corresponding author*

Keywords

Civics Education, democracy, critical citizens, Independent Curriculum, Philosophy for Children (P4C)

Abstract

Democracy is the primary foundation of national life, upholding popular sovereignty, participation, and social justice. However, the development of democracy in Indonesia still faces various challenges, ranging from low citizen political participation, social polarization, to weak digital literacy, which has the potential to threaten the quality of democracy. In this context, Civics Education (PKn) plays a strategic role in shaping the character of citizens who are critical, rational, and actively participate in public life. This article is a conceptual study that aims to explain the urgency of PKn in strengthening Indonesian democracy through a democratic, reflective, and participatory pedagogical approach. Through a literature review and analysis of educational policy, this article emphasizes that PKn plays a crucial role in developing civic knowledge, civic skills, and civic dispositions that align with the values of Pancasila and the spirit of the Independent Curriculum. Learning approaches such as Philosophy for Children (P4C), project-based learning, and strengthening the Pancasila Student Profile are considered effective in developing students' critical thinking skills and moral awareness. Furthermore, civics teachers need to act as democratic facilitators, encouraging dialogue, tolerance, and respect for differences. By strengthening democratic education in civics, Indonesia can prepare a younger generation that is not only intellectually intelligent but also possesses moral and social responsibilities in a democratic life.

Kata Kunci	Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan, demokrasi, warga negara kritis, Kurikulum Merdeka, Philosophy for Children (P4C)	Demokrasi merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, partisipasi, serta keadilan sosial. Namun, perkembangan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya partisipasi politik warga, polarisasi sosial, hingga lemahnya literasi digital yang berpotensi mengancam kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter warga negara yang kritis, rasional, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Artikel ini merupakan kajian konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan urgensi PKn dalam memperkuat demokrasi Indonesia melalui pendekatan pedagogis yang demokratis, reflektif, dan partisipatif. Melalui telaah literatur dan analisis kebijakan pendidikan, artikel ini menegaskan bahwa PKn berperan penting dalam membangun civic knowledge, civic skills, dan civic disposition yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Kurikulum Merdeka. Pendekatan pembelajaran seperti Philosophy for Children (P4C), project-based learning, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila dinilai efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran moral peserta didik. Selain itu, guru PKn perlu berperan sebagai fasilitator demokrasi yang mendorong dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan memperkuat pendidikan demokrasi dalam PKn, Indonesia dapat menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan berdemokrasi.

1. Pendahuluan

Demokrasi merupakan cita-cita sekaligus tantangan yang terus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dalam konteks modern, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga sebagai kultur sosial yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi yang sejati hanya akan terwujud apabila warga negara memiliki kesadaran kritis, partisipasi aktif, dan tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan bangsa [3], [4].

Sejak era reformasi 1998, demokrasi Indonesia mengalami kemajuan secara prosedural. Pemilu dilakukan secara langsung, kebebasan berpendapat dijamin, dan partisipasi publik meningkat. Namun, perkembangan ini belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan nilai-nilai demokrasi substantif. Fenomena politik identitas, polarisasi sosial, serta penyebaran disinformasi di ruang digital menunjukkan bahwa kualitas demokrasi kita masih rentan [14]. Demokrasi tanpa literasi politik dan etika sosial hanya akan melahirkan kebebasan yang semu.

Dalam situasi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peran yang strategis. PKn bukan sekadar mata pelajaran, tetapi juga instrumen pendidikan nilai dan karakter bangsa [12]. Melalui PKn, peserta didik diajak memahami konsep kewarganegaraan, nilai Pancasila, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan publik. PKn juga menanamkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), reflektif (*reflective thinking*), dan kemampuan berpartisipasi secara bertanggung jawab (*responsible participation*) [1], [4].

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menegaskan bahwa pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila menjadi ruh utama dalam Kurikulum Merdeka [5], [11]. Dalam konteks ini, PKn menjadi sarana strategis untuk mewujudkan profil pelajar yang “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global.” Semua elemen ini sejalan dengan

semangat demokrasi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial [3].

Lebih lanjut, dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, karakter warga negara kritis menjadi kebutuhan mendesak [16]. Warga negara masa kini hidup di tengah arus informasi yang begitu deras, di mana kebenaran dan kepalsuan sering kali sulit dibedakan. Literasi digital menjadi kompetensi baru dalam kehidupan demokratis modern [6]. Pendidikan kewarganegaraan tidak bisa lagi hanya berfokus pada hafalan norma atau struktur pemerintahan, melainkan harus mengajarkan *digital citizenship*, yang meliputi kemampuan untuk berpikir kritis, beretika, dan berpartisipasi secara positif di ruang digital [10].

Perubahan sosial akibat transformasi digital juga menuntut paradigma baru dalam pembelajaran PKn. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator demokrasi yang menciptakan ruang dialog terbuka di kelas [9]. Pembelajaran PKn perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan reflektif dan empatik melalui model pembelajaran partisipatif seperti *Philosophy for Children (P4C)*, *project-based learning*, dan *service learning* [1], [7].

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan praktik kewarganegaraan [8]. Fenomena rendahnya partisipasi publik, ujaran kebencian di media sosial, hingga sikap intoleransi terhadap perbedaan pendapat menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi masih perlu diperkuat. Pendidikan kewarganegaraan harus memberi ruang bagi siswa untuk berdiskusi dan menemukan makna nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual [15].

Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, demokrasi harus dipahami bukan sekadar kompetisi politik, tetapi juga sebagai bentuk gotong royong dalam keberagaman [3]. Oleh karena itu, PKn perlu menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam membangun demokrasi yang bermartabat [13].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian konseptual (*conceptual research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam konsep, teori, dan hasil penelitian yang relevan guna memahami urgensi Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk warga negara kritis di era demokrasi digital. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur sistematis dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, dan sintesis tema-tema konseptual yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi secara induktif untuk menemukan pola hubungan antar konsep dan makna filosofis dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks demokrasi Indonesia. Strategi pemecahan masalah diarahkan pada pembentukan model konseptual pembelajaran PKn yang reflektif, demokratis, dan berbasis literasi digital sebagai respons terhadap tantangan abad ke-21.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan dari sisi kelembagaan, namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas partisipasi warganya. Sistem pemilu yang terbuka dan kebebasan berekspresi memang menjadi ciri demokrasi prosedural yang sehat, tetapi substansi demokrasi yakni keadilan sosial, penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab moral warga negara belum sepenuhnya terwujud. Fenomena seperti rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik, apatisme generasi muda, serta meningkatnya ujaran kebencian di media sosial memperlihatkan rapuhnya budaya demokrasi kita.

Dalam konteks inilah, Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan sebagai garda depan pembentukan warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. PKn

tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai wadah pendidikan nilai yang menanamkan kesadaran kebangsaan dan moralitas publik. PKn berfungsi membangun karakter warga negara yang demokratis melalui proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial.

Menurut Balci dan Eryilmaz [1], demokrasi yang sehat tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang mendorong partisipasi reflektif. Artinya, warga negara harus dilatih untuk berpikir secara kritis terhadap isu publik dan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai moral, bukan sekadar kepentingan kelompok. Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan dialog dan refleksi merupakan jalan untuk membangun kesadaran tersebut. Dalam hal ini, pembelajaran PKn di Indonesia perlu bergerak dari pola transfer pengetahuan menuju pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual.

3.2 Pendidikan Demokrasi dan Penguatan *Civic Competence*

Konsep *civic competence* menjadi inti dari pendidikan demokrasi. Kompetensi kewarganegaraan ini mencakup tiga dimensi penting yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (kemampuan berpikir kritis dan berpartisipasi), serta *civic disposition* (sikap moral dan tanggung jawab sosial). Ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan yang menentukan kualitas warga negara demokratis [2][4].

Dalam pembelajaran PKn, dimensi *civic knowledge* tercermin dalam pemahaman peserta didik terhadap sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar konstitusi. Namun, pendidikan demokrasi yang hanya berhenti pada dimensi pengetahuan akan kehilangan maknanya jika tidak diikuti dengan keterampilan dan sikap yang relevan. Oleh karena itu, pembelajaran PKn harus mengembangkan kemampuan *civic skills* seperti berpikir kritis, berargumentasi secara logis, memecahkan masalah sosial, dan berkomunikasi secara etis.

Project-Based Learning (PjBL) dan *Philosophy for Children (P4C)* menjadi dua model pembelajaran yang terbukti efektif dalam mengembangkan *civic competence*. Melalui PjBL, siswa belajar dengan melakukan proyek sosial nyata yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti kegiatan pengabdian sosial, kampanye lingkungan, atau penelitian kecil tentang hak warga negara. Sementara itu, P4C mendorong siswa untuk berdiskusi secara filosofis, mempertanyakan nilai-nilai, dan menemukan makna moral di balik isu-isu demokratis.

Model pembelajaran ini sejalan dengan Kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia [11] menegaskan bahwa profil pelajar Pancasila yang ingin dibentuk melalui Kurikulum Merdeka mencakup enam dimensi utama: beriman dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, serta berkebinekaan global. Semua dimensi ini secara inheren adalah nilai-nilai kewarganegaraan yang menjadi tujuan utama pendidikan demokrasi.

3.3 Implementasi Nilai Demokrasi dalam Kurikulum dan Praktik PKn

Kurikulum merupakan jembatan antara gagasan pendidikan dan praktik pembelajaran di sekolah. Dalam konteks demokrasi, kurikulum seharusnya tidak hanya mengajarkan konsep politik dan pemerintahan, tetapi juga menumbuhkan sikap demokratis dan empati sosial. Di Indonesia, Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi sekolah dan guru untuk berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan masyarakat.

Dalam implementasinya, guru PKn memiliki peran strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *community-based learning*, di mana siswa terlibat langsung dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya. Kegiatan seperti forum warga, musyawarah kelas, atau

proyek sosial komunitas dapat menjadi media nyata untuk menanamkan nilai gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

Balci dan Eryilmaz [1] menegaskan bahwa model *Philosophy for Children (P4C)* memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan sikap reflektif dan kemampuan berpikir kritis. Melalui dialog terbimbing, peserta didik belajar mengajukan pertanyaan filosofis, mengembangkan argumen logis, serta menghormati pandangan yang berbeda. Model ini sangat relevan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah dan penghargaan terhadap keberagaman.

Selain itu, konsep demokrasi gotong royong yang diperkenalkan oleh Soekarno dapat dijadikan inspirasi pedagogis. Dalam pandangan ini, demokrasi bukanlah kebebasan individual semata, tetapi kerja sama kolektif yang menekankan solidaritas sosial dan keadilan. Pembelajaran PKn yang berbasis nilai lokal seperti ini membantu siswa memahami bahwa demokrasi Indonesia memiliki akar budaya sendiri yang berbeda dengan demokrasi liberal Barat.

3.4 Peran Guru PKn sebagai Fasilitator Demokrasi

Guru merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pendidikan demokrasi. Dalam paradigma pendidikan abad ke-21, guru bukan lagi pusat pengetahuan, tetapi fasilitator demokrasi yang menciptakan lingkungan belajar inklusif, terbuka, dan dialogis. Peran guru PKn bukan hanya mengajarkan konsep demokrasi, tetapi juga menampilkan praktik demokrasi di kelas.

Menurut Drane dan Higham [9], keberhasilan pendidikan demokrasi ditentukan oleh kemampuan guru membangun hubungan autentik dengan siswa berdasarkan rasa saling menghormati. Guru perlu menjadi teladan dalam hal kejujuran, empati, dan toleransi. Keteladanan moral ini menjadi fondasi utama pembentukan karakter warga negara yang beradab.

Guru PKn juga dituntut memiliki kompetensi pedagogis dan digital yang kuat. Di era digital, mereka perlu mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan relevan. Penggunaan media digital, simulasi daring, atau forum diskusi virtual dapat menjadi sarana efektif untuk melatih partisipasi demokratis siswa.

Untuk mendukung peran tersebut, diperlukan program pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi perlu menyediakan pelatihan yang menekankan pedagogi reflektif, literasi digital, serta pembelajaran berbasis nilai Pancasila. Dengan demikian, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga agen perubahan sosial yang menumbuhkan budaya demokrasi di sekolah dan masyarakat.

3.5 Tantangan dan Peluang PKn di Era Digital dan AI

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan baru bagi praktik demokrasi. Ruang digital yang terbuka memberi peluang besar bagi partisipasi warga negara, tetapi sekaligus menciptakan risiko berupa penyebaran hoaks, polarisasi opini, dan manipulasi algoritmik. Dalam situasi ini, literasi digital menjadi kompetensi utama warga negara abad ke-21 [6][16].

PKn memiliki peran penting dalam mengajarkan literasi digital demokratis, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi, beretika dalam penggunaan teknologi, serta berpartisipasi aktif dalam ruang digital secara bertanggung jawab. Guru PKn dapat mengajak siswa untuk melakukan analisis isu sosial digital, seperti ujaran kebencian, privasi data, atau etika bermedia sosial, lalu mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila.

Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat membuat kampanye sosial atau konten edukatif di media digital untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat. Dengan demikian, PKn bertransformasi menjadi pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan zaman, sekaligus benteng moral di tengah arus teknologi.

Sebagaimana ditegaskan Bromley [10], demokrasi masa depan membutuhkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen etis terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. PKn di Indonesia harus mampu mempersiapkan generasi seperti ini, yaitu generasi yang tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga sadar akan tanggung jawabnya terhadap kemanusiaan dan keberlanjutan bangsa.

4. Simpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi strategis dalam membentuk warga negara yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab di tengah dinamika demokrasi digital. Kajian ini menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya menuntut prosedur politik yang terbuka, tetapi juga membutuhkan warga negara yang memiliki kesadaran moral, literasi politik, dan kemampuan berpikir kritis terhadap realitas sosial. PKn berfungsi sebagai wahana sistematis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi Pancasila melalui proses pembelajaran yang berbasis refleksi, partisipasi, dan kontekstualisasi.

Melalui pendekatan konseptual, dapat dipahami bahwa penguatan peran PKn di era digital harus mencakup tiga dimensi utama: pengembangan civic competence, integrasi literasi digital, dan penerapan pedagogi demokratis. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam membangun karakter warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara moral dan sosial. Pendidikan kewarganegaraan harus menjadi arena dialogis di mana peserta didik belajar berpikir kritis, menghargai keberagaman, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik.

Selain itu, guru PKn perlu bertransformasi menjadi fasilitator demokrasi yang mampu menuntun peserta didik untuk memahami makna kebebasan dan tanggung jawab. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etis utama untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, PKn bukan sekadar mata pelajaran normatif, melainkan fondasi ideologis yang membentuk karakter warga negara dan memperkuat ketahanan moral bangsa.

5. Referensi

- [1] F. Balci and A. Eryilmaz, "Reconsidering Civic Education in the Age of Digital Citizenship," *Journal of Social Science Education*, vol. 20, no. 2, pp. 45–61, 2023.
- [2] S. Hoskins and J. Kerr, *Developing Civic Competence through Education*, London: Routledge, 2021.
- [3] M. A. Nurdin, "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 7, no. 3, pp. 214–226, 2022.
- [4] A. Hidayat and L. Rahmawati, "Civic Disposition and Critical Thinking: The Core of Indonesian Citizenship Education," *Indonesian Journal of Civic Education*, vol. 6, no. 1, pp. 33–49, 2021.
- [5] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila*, Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.
- [6] D. A. L. Sari, "Literasi Digital dan Tantangan Pendidikan Demokrasi di Era Artificial Intelligence," *Jurnal PPKn dan Pendidikan Karakter*, vol. 9, no. 2, pp. 128–142, 2023.
- [7] E. N. Hidayah, "Penguatan Civic Literacy dalam Kurikulum Merdeka: Tinjauan Filosofis dan Pedagogis," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial*, vol. 8, no. 1, pp. 77–93, 2024.
- [8] K. Khotimah, "Integrasi Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Menengah," *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 4, pp. 215–229, 2022.
- [9] J. Drane and R. Higham, "Educating for Reflective Citizenship in Digital Societies," *Education and Democracy Journal*, vol. 12, no. 1, pp. 12–28, 2020.
- [10] D. Bromley, "Digital Citizenship and Moral Responsibility: Education for a Networked Age," *Educational Review*, vol. 73, no. 4, pp. 389–404, 2021.
- [11] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka (Edisi 2023)*, Jakarta: Kemendikbudristek, 2023.

- [12] R. D. S. Harahap, "Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai Upaya Penguatan Karakter Demokratis Mahasiswa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, pp. 155–167, 2022.
- [13] M. Permatasari, "Pendidikan Nilai dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Kewarganegaraan Digital," *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa*, vol. 11, no. 3, pp. 45–59, 2024.
- [14] N. Siregar and A. Wijaya, "Transformasi Pembelajaran PKn pada Era Digitalisasi Sekolah," *Civic and Moral Education Journal*, vol. 10, no. 2, pp. 99–113, 2023.
- [15] L. Setiawan, "Refleksi terhadap Pendidikan Demokrasi dalam Konteks Multikulturalisme Indonesia," *Jurnal Filsafat dan Pendidikan Pancasila*, vol. 9, no. 1, pp. 20–34, 2021.
- [16] R. Rahmadani, "Digital Literacy and Democratic Citizenship in Southeast Asia," *Asian Journal of Civic Education*, vol. 5, no. 2, pp. 66–82, 2022.